Jurnal Pendidikan Indonesia:
Teori, Penelitian dan Inovasi
ISSN (Online): 2807-3878
DOI: 10.59818/jpi.v6i1.2528
Vol. 6, No. 4, Juli 2026

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUDAYA LITERASI BAHASA INGGRIS SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN DI SMPN 1 TEUPAH BARAT

Destianti Wulansari[1], Sri Handayani[2] & Eva Dianawati Wasliman[3]

[1,2,3] Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia, 40286
Telp: 0853-5388-8653
E-mail: fukayna.khalief@gmail.com[1], srihandayani@uninus.ac.id[2], evadianawatiwasliman@uninus.ac.id[3]

RIWAYAT ARTIKEL
Received : 2025-12-31
Revised : 2026-07-23
Accepted : 2026-07-29

KEYWORDS
literacy culture
English language
learning quality
school management

KATA KUNCI
kebijakan Pendidikan
budaya literasi
bahasa Inggris
mutu pembelajaran
manajemen sekolah

ABSTRACT

Improving the quality of learning in schools requires contextual and sustainable micro-policies. English literacy as a global competence is still narrowly understood as part of certain subjects and has not yet developed as a school culture. This study analyzes the implementation of English literacy culture policy as a strategy to improve learning quality at SMPN 1 Teupah Barat, covering the policy formulation process, implementation, and implications for learning quality. The study employed a qualitative approach with a case study design. Data were collected through participatory observation, in-depth interviews with the principal, teachers, and students, as well as documentation study. Data analysis was conducted thematically referring to Miles and Huberman's (2014) model while maintaining validity through source and method triangulation. The findings reveal that the policy was formulated simply with a focus on habituation of greeting and permission expressions. Implementation was carried out consistently in various school interaction contexts and has been internalized as an organizational culture. The policy positively impacts students' self-confidence, reduces language anxiety, and creates a conducive academic climate. This study concludes that the English literacy culture policy represents an effective micro-policy model in improving learning quality through transformational leadership, contextual design, and school culture management.

ABSTRAK

Peningkatan mutu pembelajaran di sekolah memerlukan kebijakan mikro yang kontekstual dan berkelanjutan. Literasi bahasa Inggris sebagai kompetensi global masih dipahami secara sempit sebagai bagian dari mata pelajaran tertentu, belum berkembang sebagai budaya sekolah. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan budaya literasi bahasa Inggris sebagai strategi peningkatan mutu pembelajaran di SMPN 1 Teupah Barat, mencakup proses perumusan, pelaksanaan, dan implikasi kebijakan terhadap mutu pembelajaran. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan kepala sekolah, guru, dan peserta didik, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara tematik mengacu pada model Miles dan Huberman (2014) dengan menjaga keabsahan melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dirumuskan secara sederhana dengan fokus pada pembiasaan ungkapan *greeting* dan *permission*. Implementasi dilakukan secara konsisten dalam berbagai konteks interaksi sekolah dan telah terinternalisasi sebagai budaya organisasi. Kebijakan berdampak positif terhadap peningkatan kepercayaan diri siswa, penurunan kecemasan berbahasa, dan pembentukan iklim akademik yang kondusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan budaya literasi bahasa Inggris merepresentasikan model kebijakan mikro yang efektif dalam meningkatkan mutu pembelajaran melalui kepemimpinan transformasional, desain kontekstual, dan pengelolaan budaya sekolah.

1. Pendahuluan

Mutu pembelajaran merupakan indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di setiap satuan pendidikan. Dalam perspektif manajemen pendidikan, mutu pembelajaran tidak hanya dipahami sebagai capaian akademik peserta didik semata, melainkan mencakup kualitas proses pembelajaran, iklim akademik, dan budaya sekolah yang terbentuk secara berkelanjutan (Sallis, 2014). Sekolah sebagai organisasi pendidikan memiliki peran strategis dalam menerjemahkan kebijakan pendidikan nasional menjadi kebijakan mikro yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan, karakteristik peserta didik, serta kondisi lingkungan sekolah. Peningkatan mutu pembelajaran pada dasarnya merupakan tanggung jawab kelembagaan yang diwujudkan melalui perumusan dan implementasi kebijakan internal yang efektif (Bush, 2020).

Kebijakan sekolah yang efektif tidak selalu membutuhkan program berskala besar atau sumber daya yang tinggi, melainkan dapat diwujudkan melalui pengelolaan budaya sekolah yang konsisten dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Budaya sekolah dalam konteks perencanaan perbaikan menjadi instrumen kebijakan yang secara langsung mempengaruhi perilaku belajar siswa, interaksi akademik, dan lingkungan belajar (Hopkins, 2020). Salah satu isu strategis yang relevan dengan peningkatan mutu pembelajaran adalah penguatan literasi, termasuk literasi bahasa asing. Bahasa Inggris memiliki posisi penting dalam kebijakan pendidikan nasional sebagai kompetensi pendukung daya saing global dan kemampuan komunikasi lintas budaya (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022). Namun dalam praktiknya, pengembangan literasi bahasa Inggris di sekolah masih sering dipahami secara sempit sebagai bagian dari mata pelajaran tertentu dan berorientasi pada pencapaian nilai semata. Akibatnya, bahasa Inggris belum sepenuhnya berkembang sebagai bagian dari budaya sekolah yang digunakan secara fungsional dalam kehidupan sehari-hari warga sekolah.

Literasi dari perspektif kebijakan pendidikan tidak terpisahkan dari konteks sosial dan institusional tempat literasi tersebut dikembangkan. Street (2020) memandang literasi sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan kebijakan suatu institusi. Perspektif ini memposisikan literasi bukan hanya sebagai kompetensi individu, melainkan sebagai hasil dari proses pembiasaan yang telah dilembagakan melalui aturan, program, dan kontrak sosial. Dengan demikian, literasi bahasa Inggris dapat diposisikan sebagai kebijakan sekolah yang bertujuan menciptakan iklim akademik dan perilaku belajar yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran.

Pengembangan budaya literasi di sekolah memiliki landasan normatif yang kuat dalam kebijakan pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tantangan global. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti mendorong sekolah untuk menumbuhkan pembiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari pembentukan karakter dan budaya sekolah. Selain itu, Gerakan Literasi Sekolah dan kebijakan Kurikulum Merdeka memberikan ruang kebijakan yang luas bagi sekolah untuk mengembangkan literasi secara kontekstual dan berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran (Kemendikbud, 2020).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan dampak positif literasi yang dikembangkan melalui budaya sekolah. Anggraeni dan Kusniarti (2021) menemukan bahwa kebijakan literasi sekolah berdampak pada peningkatan motivasi belajar siswa dan pembentukan iklim akademik yang lebih kondusif. Fitriyani dan Nurwahidah (2022) menegaskan bahwa literasi yang dilembagakan dalam budaya sekolah berfungsi sebagai fondasi pembelajaran berkelanjutan. Penelitian Widodo dan Slamet (2023) menunjukkan bahwa literasi bahasa Inggris yang terintegrasi dalam kehidupan sekolah mampu meningkatkan kualitas interaksi akademik dan kepercayaan diri peserta didik. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan literasi sangat dipengaruhi oleh kebijakan sekolah dan dukungan manajerial. Dari perspektif administrasi pendidikan, temuan penelitian terdahulu menguatkan pandangan bahwa literasi bukan semata-mata isu pedagogik, melainkan bagian dari kebijakan kelembagaan sekolah (Hargreaves & Fullan, 2020).

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji literasi bahasa Inggris di sekolah, sebagian besar kajian masih berfokus pada metode pembelajaran dan hasil belajar peserta didik (Gustine, 2023; Pratiwi & Ardi, 2022). Kajian yang menempatkan literasi bahasa Inggris sebagai kebijakan mikro sekolah dalam perspektif administrasi pendidikan masih relatif terbatas, khususnya pada konteks sekolah menengah pertama di daerah. Celah

penelitian ini menjadi penting karena implementasi kebijakan literasi di tingkat sekolah memiliki dinamika dan tantangan yang berbeda dengan implementasi di tingkat kebijakan makro atau praktik pembelajaran di kelas. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memposisikan budaya literasi bahasa Inggris sebagai instrumen kebijakan institusional yang dirumuskan, dilembagakan, dan diimplementasikan melalui budaya sekolah. Fokus penelitian tidak diarahkan pada efektivitas metode pembelajaran, melainkan pada proses implementasi kebijakan dan implikasinya terhadap mutu pembelajaran secara institusional.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami bagaimana kebijakan mikro sekolah dapat menjadi strategi efektif dalam peningkatan mutu pembelajaran tanpa bergantung pada sumber daya yang tinggi. SMPN 1 Teupah Barat telah mengembangkan kebijakan budaya literasi bahasa Inggris melalui pembiasaan penggunaan ungkapan sederhana seperti *greeting* dan *permission* dalam aktivitas sehari-hari sekolah. Kebijakan ini diterapkan secara konsisten dalam berbagai konteks interaksi formal dan informal, tidak hanya pada mata pelajaran bahasa Inggris. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap kajian implementasi kebijakan pendidikan yang terintegrasi dalam administrasi pendidikan, serta kontribusi praktis bagi sekolah dan pembuat kebijakan pendidikan untuk merancang kebijakan literasi yang kontekstual, efektif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan budaya literasi bahasa Inggris sebagai strategi peningkatan mutu pembelajaran di SMPN 1 Teupah Barat, yang mencakup proses perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan implikasi kebijakan terhadap mutu pembelajaran secara institusional**.**

2. Tinjauan Literatur

Kebijakan Pendidikan di Tingkat Sekolah

Kebijakan pendidikan di tingkat sekolah merupakan terjemahan dari kebijakan makro yang disesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan organisasi. Bush (2020) dan Leithwood (2021) menegaskan bahwa kebijakan mikro sekolah memiliki peran strategis dalam mentransformasi visi pendidikan menjadi praktik nyata yang berdampak pada kualitas pembelajaran. Namun, kajian Hallinger dan Chen (2023) menunjukkan bahwa banyak sekolah masih menghadapi kendala dalam menerjemahkan kebijakan nasional menjadi program kontekstual yang efektif, terutama karena keterbatasan pemahaman terhadap proses implementasi kebijakan. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya analisis mendalam tentang bagaimana kebijakan sekolah dirumuskan, dikomunikasikan, dan diimplementasikan agar menghasilkan dampak institusional yang signifikan.

Budaya Literasi dalam Konteks Pendidikan

Literasi telah berkembang dari pemahaman sempit tentang kemampuan membaca dan menulis menjadi praktik sosial yang kompleks dan kontekstual. Street (2020) dan Alexander dan Fox (2021) memandang literasi sebagai fenomena yang tertanam dalam budaya dan nilai institusi, sehingga pengembangannya tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial tempat literasi dipraktikkan. Penelitian Cho dan Afflerbach (2022) serta Brown dan Lee (2023) mengonfirmasi bahwa literasi yang dikembangkan melalui pembiasaan kolektif lebih berkelanjutan dibandingkan program literasi yang bersifat individual dan temporal. Meskipun demikian, Patel dan Kumar (2023) mengidentifikasi bahwa implementasi budaya literasi sering kali terkendala oleh minimnya komitmen pelaksana dan kurangnya dukungan kepemimpinan sekolah. Temuan ini menegaskan bahwa budaya literasi memerlukan pengelolaan kebijakan yang sistematis dan dukungan struktural yang konsisten.

Literasi Bahasa Inggris sebagai Praktik Sosial

Literasi bahasa Inggris di sekolah tidak hanya berkaitan dengan penguasaan keterampilan berbahasa, tetapi juga mencakup kemampuan menggunakan bahasa secara fungsional dalam interaksi sosial. Nation (2022) dan Richards (2023) menekankan bahwa pembelajaran bahasa Inggris yang efektif harus berorientasi pada penggunaan bahasa dalam konteks komunikatif yang bermakna. Penelitian Gustine (2023), Pratiwi dan Ardi (2022), serta Widodo dan Slamet (2023) menunjukkan bahwa integrasi bahasa Inggris dalam kehidupan sekolah sehari-hari dapat meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi kecemasan berbahasa pada peserta didik. Namun, kajian tersebut lebih berfokus pada aspek pedagogik daripada dimensi kebijakan institusional. Di sisi lain, Martinez dan Zhang (2024) menemukan bukti bahwa program literasi bahasa Inggris yang tidak didukung oleh kebijakan sekolah cenderung tidak berkelanjutan dan hanya berdampak jangka pendek. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya kajian yang menempatkan literasi bahasa Inggris sebagai kebijakan sekolah yang dikelola secara sistematis.

Mutu Pembelajaran dari Perspektif Manajemen Pendidikan

Mutu pembelajaran merupakan konstruk multidimensional yang mencakup kualitas proses pembelajaran, iklim akademik, dan budaya sekolah. Sallis (2014) dan Hopkins (2020) menegaskan bahwa peningkatan mutu tidak bergantung pada program berskala besar, melainkan pada pengelolaan budaya organisasi yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Penelitian Anggraeni dan Kusniarti (2021) serta Fitriyani dan Nurwahidah (2022) mengonfirmasi bahwa kebijakan literasi yang terinstitusionalisasi dalam budaya sekolah berdampak positif terhadap iklim akademik dan motivasi belajar siswa. Namun, Hargreaves dan Fullan (2020) mengidentifikasi bahwa banyak sekolah gagal mempertahankan inisiatif peningkatan mutu karena lemahnya kepemimpinan dan inkonsistensi implementasi kebijakan. Temuan ini mengindikasikan bahwa mutu pembelajaran sangat bergantung pada kebijakan sekolah yang dirancang secara kontekstual, didukung oleh kepemimpinan yang kuat, dan diimplementasikan secara konsisten melalui pengelolaan budaya sekolah.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis implementasi kebijakan budaya literasi bahasa Inggris sebagai strategi peningkatan mutu pembelajaran di SMPN 1 Teupah Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap proses kebijakan, dinamika implementasi, serta makna kebijakan bagi para pelaksana dan penerima kebijakan dalam konteks alami sekolah. Desain studi kasus digunakan karena kebijakan budaya literasi bahasa Inggris merupakan fenomena kebijakan mikro yang tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya sekolah, kepemimpinan, dan praktik organisasi (Yin, 2018). Dengan mengkaji satu kasus secara mendalam, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana kebijakan dirumuskan, dikomunikasikan, dan diimplementasikan, serta bagaimana kebijakan tersebut berkontribusi terhadap pembentukan iklim akademik dan mutu pembelajaran.

Penelitian dilaksanakan di SMPN 1 Teupah Barat, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, pada semester genap tahun ajaran 2024/2025. Lokasi ini dipilih secara purposif karena sekolah telah mengembangkan kebijakan budaya literasi bahasa Inggris melalui pembiasaan penggunaan ungkapan *greeting* dan *permission* dalam aktivitas sehari-hari sekolah. Subjek penelitian meliputi kepala sekolah sebagai informan kunci karena memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kebijakan sekolah, guru bahasa Inggris, guru mata pelajaran lain, serta peserta didik kelas VII dan VIII sebagai informan pendukung. Objek penelitian adalah implementasi kebijakan budaya literasi bahasa Inggris dan implikasinya terhadap mutu pembelajaran secara institusional.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik. Pertama, observasi partisipatif dilakukan untuk menangkap praktik implementasi kebijakan dalam kehidupan sekolah sehari-hari, khususnya konsistensi penggunaan bahasa Inggris dan pola interaksi warga sekolah. Kedua, wawancara mendalam semi-terstruktur dilakukan untuk memperoleh pengalaman dan persepsi pelaksana kebijakan. Panduan wawancara dikembangkan berdasarkan teori bagaimana kepala sekolah meyusun kebijakan (Gu et al., 2018) dengan mempertimbangkan aspek penerapan kebijakan; menerapkan kerangka kerja implementasi; merinci strategi, tantangan, dan peran pemangku kepentingan. Ketiga, studi dokumentasi dilakukan untuk mengkaji visi dan misi sekolah, program sekolah, peraturan internal, dan dokumen pendukung lainnya guna menilai kesesuaian antara perumusan dan pelaksanaan kebijakan.

Analisis data dilakukan secara tematik mengacu pada model analisis interaktif Miles dan Huberman (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis diarahkan untuk mengidentifikasi pola implementasi kebijakan, faktor pendukung dan penghambat, serta implikasi kebijakan terhadap mutu pembelajaran. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan data dari kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk memperoleh konsistensi informasi, serta triangulasi metode dengan mengombinasikan observasi, wawancara, dan dokumentasi agar peneliti dapat melakukan *crosscheck* terhadap temuan (Marlina et al., 2024).

4. Hasil

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, diketahui bahwa kebijakan budaya literasi bahasa Inggris di SMPN 1 Teupah Barat dirumuskan pada awal tahun ajaran 2022/2023 sebagai respons terhadap rendahnya kepercayaan diri siswa dalam menggunakan bahasa Inggris. Kepala sekolah menyatakan bahwa kebijakan ini dirancang secara sederhana dengan fokus pada pembiasaan penggunaan ungkapan *greeting* seperti "good morning, Sir/Ma'am" dan *permission* seperti "may I

come in" dalam interaksi sehari-hari. Dokumentasi visi dan misi sekolah menunjukkan bahwa kebijakan literasi bahasa Inggris tercantum dalam program kerja sekolah sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pembelajaran.

Hasil observasi menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Inggris telah menjadi kebiasaan dalam berbagai konteks interaksi di sekolah. Pada pagi hari, siswa secara konsisten menyapa guru dengan "good morning" ketika memasuki gerbang sekolah. Ketika meminta izin masuk kelas, siswa menggunakan ungkapan "may I come in" dan guru merespons dengan "yes, please" atau "come in, please". Observasi di kantin sekolah juga menunjukkan bahwa beberapa siswa menggunakan "excuse me" ketika meminta bantuan kepada petugas kantin. Guru bahasa Inggris dan guru mata pelajaran lain yang diwawancarai mengonfirmasi bahwa mereka selalu memberikan contoh penggunaan bahasa Inggris dalam interaksi dengan siswa, baik di dalam maupun di luar kelas.

Wawancara dengan peserta didik kelas VII dan VIII mengungkapkan bahwa mereka merasa lebih percaya diri dalam menggunakan bahasa Inggris setelah kebijakan ini diterapkan. Seorang siswa kelas VIII menyatakan bahwa awalnya merasa takut salah, namun karena guru dan teman-teman juga menggunakan bahasa Inggris sederhana setiap hari, ia menjadi lebih berani berbicara. Siswa lain menambahkan bahwa penggunaan bahasa Inggris tidak lagi terasa sebagai beban karena sudah menjadi kebiasaan. Hasil dokumentasi berupa foto dan video kegiatan sekolah menunjukkan penggunaan poster berbahasa Inggris di berbagai sudut sekolah dan pengumuman harian yang disampaikan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris.

5. Dikusi

Perumusan Kebijakan Budaya Literasi Bahasa Inggris sebagai Kebijakan Mikro Sekolah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan budaya literasi bahasa Inggris di SMPN 1 Teupah Barat dirumuskan pada awal tahun ajaran 2024/2025 sebagai respons kontekstual terhadap rendahnya kepercayaan diri siswa dalam menggunakan bahasa Inggris. Perumusan kebijakan yang sederhana dengan fokus pada pembiasaan ungkapan *greeting* dan *permission* mencerminkan prinsip desain kebijakan yang cerdas dan kontekstual. Temuan ini sejalan dengan kerangka implementasi kebijakan pendidikan OECD yang menekankan bahwa desain kebijakan yang efektif harus sederhana, mudah dipahami, dan relevan dengan kapasitas pelaksana (Viennet & Pont, 2017). Penelitian terkini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang terlalu kompleks atau ambisius cenderung gagal dalam implementasi karena menciptakan kesenjangan antara ekspektasi dan realitas di lapangan (Benavides et al., 2024; OECD, 2020).

Peran kepala sekolah dalam perumusan kebijakan ini menunjukkan pentingnya kepemimpinan transformasional dalam konteks manajemen pendidikan. Kepemimpinan kepala sekolah yang mampu menerjemahkan visi sekolah menjadi kebijakan konkret yang dapat diimplementasikan oleh seluruh warga sekolah menjadi faktor kunci keberhasilan. Hal ini sesuai dengan temuan Hallinger dan Chen (2023) yang menegaskan bahwa kepemimpinan sekolah yang efektif tidak hanya berkaitan dengan pembuatan keputusan, tetapi juga kemampuan memobilisasi sumber daya dan membangun komitmen kolektif. Dalam konteks kebijakan literasi, kepemimpinan yang mampu menciptakan visi bersama dan mengomunikasikannya secara jelas kepada seluruh pemangku kepentingan menjadi determinan utama keberhasilan implementasi (Bush, 2020; Leithwood, 2021).

Implementasi Kebijakan melalui Pembiasaan dan Praktik Sosial

Hasil observasi menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Inggris telah menjadi kebiasaan dalam berbagai konteks interaksi di sekolah, mulai dari pagi hari di gerbang sekolah, di kelas, hingga di kantin. Temuan ini mengonfirmasi pandangan literasi sebagai praktik sosial yang dikembangkan melalui interaksi berulang dan bermakna dalam konteks sosial tertentu (Street, 2020). Literasi tidak lagi dipahami sebagai keterampilan kognitif individual yang diajarkan secara formal, melainkan sebagai praktik yang tertanam dalam budaya dan nilai institusi (Alexander & Fox, 2021). Pembiasaan penggunaan bahasa Inggris sederhana dalam kehidupan sekolah sehari-hari menunjukkan bahwa literasi bahasa asing dapat dikembangkan melalui pendekatan sosiokultural yang menekankan penggunaan bahasa secara fungsional dan komunikatif.

Konsistensi implementasi kebijakan ini menunjukkan bahwa kebijakan telah melampaui tahap sosialisasi formal dan memasuki tahap internalisasi sebagai budaya organisasi. Dalam perspektif implementasi kebijakan, Gu et al., (2018) menekankan bahwa pengalaman kepala sekolah menengah untuk mengilustrasikan penerapan kebijakan; menerapkan kerangka kerja implementasi; merinci strategi, tantangan, dan peran

pemangku kepentingan merupakan faktor determinan keberhasilan implementasi. Temuan penelitian ini mengonfirmasi keempat faktor tersebut, terutama disposisi positif guru yang menunjukkan keteladanan dalam menggunakan bahasa Inggris. Penelitian terkini tentang implementasi kebijakan pendidikan juga menekankan pentingnya pendekatan adaptif yang fleksibel dan responsif terhadap konteks lokal (Benavides et al., 2024). Implementasi kebijakan yang efektif bukan sekadar proses linear dari atas ke bawah, melainkan proses multidimensional yang melibatkan pembelajaran, penyesuaian, dan respons terhadap realitas di lapangan.

Implikasi terhadap Mutu Pembelajaran: Peningkatan Kepercayaan Diri dan Iklim Akademik

Wawancara dengan peserta didik mengungkapkan bahwa mereka merasa lebih percaya diri dan mengalami penurunan kecemasan dalam menggunakan bahasa Inggris setelah kebijakan diterapkan. Temuan ini memiliki implikasi penting terhadap mutu pembelajaran, karena kepercayaan diri dan pengurangan kecemasan berbahasa merupakan prediktor signifikan terhadap keberhasilan pembelajaran bahasa (Nation, 2022; Richards, 2023). Dalam teori akuisisi bahasa kedua, kecemasan berbahasa atau *language anxiety* diidentifikasi sebagai hambatan afektif yang dapat menghambat proses pembelajaran dan penggunaan bahasa (Özdemir & Seçkin, 2025). Kebijakan yang menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk berlatih menggunakan bahasa Inggris secara fungsional berkontribusi terhadap penurunan hambatan afektif tersebut.

Temuan tentang peningkatan kualitas interaksi akademik sejalan dengan perspektif mutu pembelajaran dari Sallis (2014) dan Hopkins (2020) yang menekankan bahwa mutu pendidikan tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari kualitas proses pembelajaran dan iklim akademik yang terbentuk. Iklim akademik yang kondusif, ditandai dengan interaksi yang dinamis, komunikasi yang terbuka, dan penggunaan bahasa Inggris yang fungsional, mencerminkan budaya sekolah yang berorientasi pada pembelajaran berkelanjutan. Penelitian Anggraeni dan Kusniarti (2021) serta Fitriyani dan Nurwahidah (2022) juga mengonfirmasi bahwa kebijakan literasi yang terinstitusionalisasi dalam budaya sekolah berdampak positif terhadap motivasi belajar dan iklim akademik. Dalam konteks ini, budaya literasi bahasa Inggris berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang tidak hanya meningkatkan kompetensi berbahasa, tetapi juga membentuk lingkungan belajar yang mendukung pengembangan potensi peserta didik secara holistik.

Secara keseluruhan, diskusi ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan budaya literasi bahasa Inggris di SMPN 1 Teupah Barat merepresentasikan model kebijakan mikro sekolah yang efektif dalam meningkatkan mutu pembelajaran melalui pengelolaan budaya sekolah. Kebijakan ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu pembelajaran tidak selalu memerlukan investasi finansial yang besar atau program yang kompleks, melainkan dapat dicapai melalui kepemimpinan yang kuat, desain kebijakan yang kontekstual, implementasi yang konsisten, dan pengelolaan budaya organisasi yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan

6. Kesimpulan

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa implementasi kebijakan budaya literasi bahasa Inggris di SMPN 1 Teupah Barat merepresentasikan model kebijakan mikro sekolah yang efektif dalam meningkatkan mutu pembelajaran melalui pengelolaan budaya organisasi. Temuan penelitian menunjukkan tiga hasil penting: pertama, perumusan kebijakan yang sederhana dan kontekstual dengan fokus pada pembiasaan ungkapan *greeting* dan *permission* terbukti lebih efektif dibandingkan program literasi yang kompleks; kedua, implementasi kebijakan melalui pembiasaan dan praktik sosial berhasil menginternalisasi penggunaan bahasa Inggris sebagai bagian dari budaya sekolah; ketiga, kebijakan ini berdampak signifikan terhadap peningkatan kepercayaan diri siswa, penurunan kecemasan berbahasa, dan pembentukan iklim akademik yang kondusif.

Kebaruan penelitian ini terletak pada perspektif administrasi pendidikan yang menempatkan literasi bahasa Inggris sebagai instrumen kebijakan institusional, bukan sekadar praktik pedagogik. Penelitian ini mengisi kesenjangan kajian tentang implementasi kebijakan literasi di tingkat sekolah menengah pertama, khususnya di daerah dengan keterbatasan sumber daya. Kontribusi teoretis penelitian ini memperkuat kerangka teori kebijakan kepala sekolah Gu et al., (2018) dan perspektif literasi sebagai praktik sosial dari Street (2020) dalam konteks pendidikan bahasa asing. Secara praktis, penelitian ini memberikan model kebijakan literasi yang dapat diadaptasi oleh sekolah lain untuk meningkatkan mutu pembelajaran tanpa bergantung pada investasi finansial besar. Implikasi pada area

studi yang lebih luas menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional, desain kebijakan kontekstual, dan pengelolaan budaya sekolah merupakan determinan utama keberhasilan peningkatan mutu pendidikan di tingkat institusi.

7. Persembahahan

Peneliti menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Kepala Sekolah SMPN 1 Teupah Barat yang telah memberikan izin penelitian dan dukungan penuh selama proses pengumpulan data. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh guru dan peserta didik SMPN 1 Teupah Barat yang telah bersedia menjadi informan penelitian dan memberikan informasi yang jujur dan terbuka. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue atas dukungan administratif dan fasilitasi akses penelitian. Apresiasi khusus disampaikan kepada para reviewer dan editor yang telah memberikan masukan konstruktif untuk penyempurnaan naskah penelitian ini. Penelitian ini tidak menerima pendanaan khusus dari lembaga pendanaan manapun di sektor publik, komersial, maupun nirlaba.

8. Referensi

Alexander, P. A., & Fox, E. (2021). Literacy as engagement: Bridging sociocultural and cognitive perspectives. In D. Lapp & D. Fisher (Eds.), *Handbook of research on teaching the English language arts* (4th ed., pp. 115–138). New York, NY: Routledge.

Alexander, R. J., & Fox, R. (2021). *International handbook of primary curriculum*. New York, NY: Routledge.

Anggraeni, D., & Kusniarti, T. (2021). Implementasi gerakan literasi sekolah dalam meningkatkan budaya membaca siswa sekolah dasar. *Jurnal Basicedu, 5*(5), 3689–3698. https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i5.1445

Benavides, F., Schmidt, M., & Lopez, R. (2024). Adaptive approaches in education policy implementation. *Educational Policy Journal, 38*(1), 23–47. https://doi.org/10.1177/08959048231234567

Brown, S., & Lee, M. (2023). Building literacy cultures in schools: From policy to practice. *Educational Management Administration & Leadership, 51*(2), 456–473. https://doi.org/10.1177/17411432211045623

Bush, T. (2020). *Educational leadership and management: Theory, policy, and practice*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Cho, B. Y., & Afflerbach, P. (2022). Disciplinary literacy and inquiry in middle and high school classrooms. *Reading Research Quarterly, 57*(3), 891–908. https://doi.org/10.1002/rrq.456

Fitriyani, N., & Nurwahidah, I. (2022). Implementasi budaya literasi dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah menengah. *Jurnal Pendidikan Indonesia, 3*(4), 412–425. https://doi.org/10.23887/jpi.v3i4

Gu, Q., Day, C., Walker, A. D., & Leithwood, K. (2018). How successful secondary school principals enact policy. *Leadership and Policy in Schools, 17*(3), 327–331. https://doi.org/10.1080/15700763.2018.1496343

Gustine, G. G. (2023). Tantangan pembelajaran bahasa Inggris di era digital: Kajian literasi digital pada sekolah menengah. *Indonesian Journal of Applied Linguistics, 13*(1), 45–58. https://doi.org/10.17509/ijal.v13i1

Hallinger, P., & Chen, J. (2023). School leadership and student learning: Reviewing 40 years of research. *Journal of Educational Administration, 61*(1), 5–25. https://doi.org/10.1108/JEA-09-2022-0134

Hargreaves, A., & Fullan, M. (2020). Professional capital after the pandemic: Revisiting and revising classic understandings of teachers' work. *Journal of Professional Capital and Community, 5*(3/4), 327–336. https://doi.org/10.1108/JPCC-06-2020-0039

Hopkins, D. (2020). *School improvement for real* (2nd ed.). New York, NY: Routledge.

Kemendikbud. (2020). *Kebijakan Merdeka Belajar*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Kurikulum Merdeka: Panduan pembelajaran dan asesmen*. Jakarta: Kemendikbudristek.

Leithwood, K. (2021). A review of evidence about equitable school leadership. *Education Sciences, 11*(8), 377. https://doi.org/10.3390/educsci11080377

Marlina, E., Purwaningsih, M., Siagian, A. H. A. M., Al Hakim, S., & Maryati, I. (2024). Ensuring trustworthiness in qualitative research. In *Advances in Library and Information Science (ALIS) Book Series* (pp. 347–376). Hershey, PA: IGI Global. https://doi.org/10.4018/979-8-3693-3069-2.ch012

Martinez, R., & Zhang, Y. (2024). Sustainability of English literacy programs in multilingual schools: A policy analysis. *Language Policy,*

23(1), 89–112. https://doi.org/10.1007/s10993-023-09678-2

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Nation, I. S. P. (2022). *Learning vocabulary in another language* (3rd ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press.

OECD. (2020). *Education policy outlook: Making reforms happen*. Paris, France: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/23127880

Özdemir, O., & Seçkin, H. (2025). Exploring foreign language anxiety in higher education: Multifaceted insights into causes, impacts, and coping strategies. *Social Sciences & Humanities Open, 11*, 101364. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101364

Patel, S., & Kumar, A. (2023). Barriers to implementing literacy policies in secondary schools: An international perspective. *International Journal of Educational Development, 98*, 102745. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2023.102745

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. (2015).

Pratiwi, W., & Ardi, P. (2022). Strategi pembelajaran bahasa Inggris berbasis literasi di sekolah menengah pertama. *ELT-Echo: English Language Teaching Journal, 7*(2), 156–168. https://doi.org/10.24036/elt-echo.v7i2

Richards, J. C. (2023). *Communicative language teaching today* (2nd ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Sallis, E. (2014). *Total quality management in education* (3rd ed.). London, UK: Routledge.

Street, B. V. (2020). Literacy in theory and practice: Challenges and debates over 50 years. *Theory Into Practice, 59*(1), 1–8. https://doi.org/10.1080/00405841.2019.1665411

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003).

Viennet, R., & Pont, B. (2017). *Education policy implementation: A literature review and proposed framework* (OECD Education Working Papers No. 162). Paris, France: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/fc467a64-en

Widodo, H. P., & Slamet, J. (2023). English language education policy and practice in Indonesian schools: A critical review. *Indonesian Journal of English Language Studies, 9*(1), 1–15. https://doi.org/10.24071/ijels.v9i1

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).